

Peran Transfer Dana Penyesuaian dan Dana Perimbangan Terhadap Peningkatan Belanja Modal Daerah Untuk Menciptakan *Quality Spending*

IMAM SUMARDJOKO

ANDRY IRWANTO

Universitas Airlangga

Abstrak

Persoalan ketimpangan pembangunan antar daerah dan disparitas fiskal menjadi permasalahan desentralisasi fiskal saat ini. Tantangan terbesar dalam membangun desentralisasi fiskal bukan hanya memberi dana kepada pemerintah daerah, tetapi menciptakan dampak peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi regional. Transfer ke daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan tersebut belum maksimal menanggulangi kemiskinan, pemerataan infrastruktur, kesenjangan fiskal, dan ekonomi regional yang kompetitif.

Penelitian dana desentralisasi fiskal di beberapa negara telah dilakukan jauh sebelum penerapan otonomi daerah. Hasilnya beragam sesuai dengan karakteristik daerah di negara tersebut. Selain hasil penelitian beragam, implementasi transfer ke daerah menimbulkan perbedaan pendapat. Indonesia memiliki keanekaragaman karakteristik dan persebaran daerah yang luas. Pertanyaan menarik adalah apakah peningkatan transfer ke daerah dapat mendorong pembangunan regional melalui belanja modal daerah.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat *explanatory research* menemukan hubungan baru melalui pengujian hipotesis. Analisa regresi melibatkan lima variabel independen yaitu dana transfer DAU, DAK, DBH, DID, BOS seta variabel dependen yaitu belanja modal daerah. Data penelitian berasal dari laporan realisasi APBD dan Laporan Keuangan Transfer Ke Daerah periode tahun 2012-2014.

Hasil penelitian membuktikan DAU, DAK, DBH, dan DID memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah dengan probabilitas signifikansi masing-masing kurang dari 0,05. Hasil ini selaras dengan teori *fiscal federalism*. Sedangkan BOS tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah dengan *p-value* sebesar 0,379. BOS sebagai bantuan penyelenggaraan pendidikan dasar belum mampu memberi keleluasaan APBD untuk meningkatkan penggunaan belanja modal. Kelima variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal daerah.

Keywords : *dana penyesuaian, dana perimbangan, belanja modal*

1. Pendahuluan

Sepertiga pengeluaran APBN dialihkan kepada pemerintah daerah melalui transfer ke daerah sebagai implementasi desentralisasi fiskal. Jumlah transfer ke daerah sebesar Rp 528,6 triliun atau 31,41% dari total APBN sebesar Rp 1.683 triliun pada tahun 2013. Angka pengeluaran untuk transfer ke daerah meningkat menjadi Rp 592,6 triliun atau sekitar 32,16% dari total APBN 2014 sebesar Rp 1.842,5 triliun. Jumlah transfer ke daerah terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Namun demikian, peningkatan alokasi transfer ke daerah tersebut belum maksimal menanggulangi kemiskinan, pemerataan infrastruktur, kesenjangan fiskal, dan pembangunan ekonomi regional yang kompetitif (Martowardojo, 2011).

Persoalan ketimpangan pembangunan antar daerah dan disparitas fiskal menjadi permasalahan desentralisasi fiskal saat ini. Tantangan terberat dalam membangun desentralisasi fiskal tidak sekedar memberikan dana kepada pemerintah daerah, tetapi bagaimana menciptakan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah (WorldBank, 2007). Pemerintah terus berupaya memberi perhatian yang besar terhadap penerapan desentralisasi fiskal melalui instrumen transfer ke daerah. Implikasinya adalah jumlah transfer ke daerah dalam APBN memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya.

Implementasi transformasi transfer ke daerah belum sepenuhnya membangkitkan kemandirian daerah. Karakteristik daerah, kondisi geografis, dan ketersediaan sumber daya menjadi faktor fundamental. Beberapa daerah memiliki rasio kemandirian fiskal tinggi sedangkan sebagian besar lainnya masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dan dana penyesuaian mengindikasikan PAD belum memiliki peran dominan sebagai lokomotif pembangunan di daerah.

Transfer ke daerah menjadi stimulus APBD untuk mempercepat kemandirian pemerintah daerah (Naganathan, 1999). Kemandirian daerah dan pemerataan pembangunan menjadi sasaran otonomi daerah melalui penerapan desentralisasi fiskal. Bukti empiris menunjukkan transfer pemerintah pusat memberikan dampak besar pada belanja daerah untuk penyediaan layanan publik (Milas, 2001). Ketidaktepatan pemanfaatan transfer ke daerah akan menambah tingginya SILPA daerah. Salah satu penyebab SILPA adalah kelebihan penerimaan dana perimbangan serta penghematan belanja daerah (Kusnandar, 2012). Namun, SILPA APBD yang disebabkan oleh tidak terealisasinya anggaran kegiatan menjadi permasalahan tersendiri. Hal ini akan berdampak pada percepatan program pembangunan.

Tingginya SILPA APBD sebagai *idle money* baik secara nominal maupun persentase tentu menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun dana *idle* memberi keuntungan melalui pendapatan bunga namun tidak menimbulkan dampak efek pengganda pada perekonomian daerah. Laporan SILPA APBD tahun 2013 yang dirilis Kementerian Keuangan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp. 114,8 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding besaran SILPA tahun 2012 yang mencapai Rp. 10,5 triliun. Kondisi ini mengundang sorotan publik karena dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan. Pemerintah daerah harus lebih mengarahkan *quality spending* untuk menciptakan APBD produktif.

Pengelolaan APBD yang produktif ditempuh dengan mengurangi belanja konsumtif, meningkatkan PAD dan memperbesar alokasi belanja modal untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Ketersediaan infrastruktur daerah melalui peningkatan alokasi belanja modal memberi iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi regional. Belanja infrastruktur pemerintah yang produktif akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Kappeler, 2012). Perbaikan infrastruktur mendorong investasi publik. Infrastruktur daerah yang memadai akan menunjang aktifitas masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat

produktifitas. Belanja pembangunan adalah upaya logis pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional (Lin, 2000). Salah satu indikator belanja yang baik adalah semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari total belanja daerah..

Penyempurnaan transfer ke daerah secara terus menerus diharapkan mampu mengurai tantangan desentralisasi fiskal. Pengujian dana desentralisasi fiskal terhadap variabel ekonomi selalu menarik berbagai kalangan sejalan dengan jawaban dinamika daerah. Penelitian sebelumnya fokus pada pengujian dana perimbangan sebagai kesatuan tanpa melibatkan *grants* lain yang diberikan pemerintah pusat. Sedangkan penggunaan dana penyesuaian seperti dana insentif daerah dan bantuan operasional sekolah belum pernah diteliti dalam kaitannya dengan belanja modal daerah. Padahal kedua jenis *grants* berperan penting mendukung *fiscal federalism theory* sebagai upaya kemandirian daerah.

Penelitian mengenai dana desentralisasi fiskal di beberapa negara telah dilakukan jauh sebelum negara kita menerapkan otonomi daerah. Hasil kajian tersebut beragam sesuai dengan karakteristik daerah di negara tersebut. Penelitian Vaillancourt (2000), Bahl dan Wallace (2001), Andersson (2002), Zhang dan Zou (2001), Faguet (2004), McNab dan Martinez (2005), Sánchez (2006), De Mello (2010), Martinez (2011), Kappeler (2012), Lee (2013), Bahl dan Bird (2013), Liu (2014) membuktikan bahwa penerapan desentralisasi fiskal pada beberapa negara memperbaiki fasilitas pendidikan, mendorong investasi publik, dan meningkatkan belanja infrastruktur. Sedangkan beberapa penelitian lain memberi hasil sebaliknya seperti yang dilakukan Davodi dan Zou (1995), West (1995), Philips dan Woller (1997), Ravallion (1998), Strumpf (1999) membuktikan desentralisasi fiskal pada beberapa negara berkembang menyebabkan ketidakseimbangan pada belanja publik dan tidak mendorong perekonomian daerah.

Selain ragam hasil penelitian pada beberapa daerah, pengaruh transfer ke daerah menimbulkan perbedaan pendapat. Argumen pro desentralisasi menyatakan desentralisasi

fiskal akan mendorong peningkatan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, akuntabilitas, dan mobilisasi sumber daya. Sebaliknya pendapat kontra desentralisasi mengemukakan pelaksanaan desentralisasi berdampak semakin tingginya ketidakmerataan atau *inequality*. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman karakteristik dan persebaran daerah yang luas. Pertanyaan yang menarik adalah apakah transfer ke daerah yang terus meningkat setiap tahun dapat mendorong pembangunan regional melalui belanja modal daerah.

2. Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis

Fiscal Federalism Theory dibangun oleh Hayek (1945), Richard Musgrave (1959), Oates (1972), dan Bahl (1992). Teori tersebut menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui instrumen *revenue* dan *expenditure* antar pemerintah.

Teori *fiscal federalism* mengemukakan desentralisasi fiskal mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat insentif fiskal yang diberikan kepada masyarakatnya (Shah, 1994). Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas alokasi sumber daya karena pemerintah daerah dapat mengelola anggaran lebih baik menurut karakteristik dan geografisnya, pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik untuk menggali preferensi dan kebutuhan daerah, dan pemerintah menjadi inovatif dan memiliki akuntabilitas bagi warga dan masyarakatnya (Oates, 2006).

Desentralisasi fiskal menerapkan prinsip *money follow function*. Setiap penyerahan wewenang kepada pemerintahan di bawahnya menimbulkan konsekuensi pada anggaran yang dibutuhkan. Pelimpahan kewenangan tersebut harus diikuti dengan penyerahan sumber-

sumber pendanaan kepada pemerintah daerah. Penyerahan sumber pendanaan kepada daerah utamanya dilakukan dalam dua bentuk yaitu penyerahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian pendanaan melalui transfer ke daerah.

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menitikberatkan pada desentralisasi sisi *expenditure*, sehingga penyerahan kewenangan pemungutan perpajakan daerah dan retribusi daerah masih relatif terbatas. Desentralisasi sisi pengeluaran memberi kewenangan daerah melalui transfer ke daerah beserta diskresi penggunaannya serta didukung upaya penguatan *local taxing power*.

Transfer ke daerah merupakan kebijakan derivatif otonomi daerah melalui pelimpahan wewenang pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal menimbulkan persaingan antara pemerintahan daerah untuk menjadi pemenang. Kompetisi dilakukan untuk menyediakan kebutuhan terbaik bagi masyarakat dan merubah struktur ekonomi melalui peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan (Bahl, 1992).

Ricard Musgrave (1980) dalam teori *fiscal federalism* mengungkapkan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan publik melalui pengelolaan *revenue* dan *expenditure* antar pemerintah. Esensi desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan maupun keleluasaan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritasnya. Dua instrumen penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah kewenangan memungut pajak dan transfer ke daerah. Pengelolaan belanja daerah yang mengedepankan *quality spending* akan memberi efek *multiplier* yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi..

Transfer ke daerah memberi implikasi yang luas pada beberapa isu di antaranya pertumbuhan dan pembangunan, pengurangan kemiskinan, pencapaian *Milenium Development Goals*, peningkatan layanan publik, serta stabilitas makroekonomi yang lebih baik (Boex, 2013). Pada beberapa negara, pemberian *non matcing grants* oleh pemerintah

pusat berdampak pada peningkatan investasi publik (Zou, 1994). Studi Andersson (2002) atas perubahan sistem *grants* terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Swedia memperlihatkan bahwa peningkatan *non matching grants* menimbulkan kenaikan belanja daerah. Hipotesis pertama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Transfer DAU berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Conditional grants diarahkan untuk mencapai sasaran sektoral melalui sinergi pemerintah pusat dan partisipasi pemerintah daerah dalam rangka stimulasi pengeluaran pada kebijakan tertentu (Boex, 2013). Transfer DAK salah satunya diarahkan untuk akselerasi pencapaian *Millenium Development Goals* (Kemenkeu, 2014). Desentralisasi fiskal mempercepat pencapaian MDGs pada beberapa negara (Martinez-Vazquez, 2011). Hipotesis kedua yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Transfer DAK berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Revenue sharing menjadi konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. DBH dialokasikan pada belanja daerah yang mengarah pada investasi publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai imbal balik atas pembayaran pajak. Karakteristik DBH yang bersifat *block grant* memberi keleluasaan pada daerah untuk mengalokasikan dana tersebut pada belanja yang bersifat produktif. Hipotesis ketiga yang dirumuskan :

H₃ : Transfer Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal daerah.

Hasil kajian atas realisasi belanja modal daerah memperlihatkan angka di bawah target yang disebabkan keterlambatan penetapan APBD (Ilyas, 2013). Upaya daerah meningkatkan PAD memberi pengaruh positif terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki upaya meningkatkan PAD, menyampaikan APBD tepat waktu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional akan berdampak pada pertumbuhan belanja

infrastruktur melalui penyediaan layanan publik yang lebih baik. Hipotesis keempat yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H4: Transfer DID berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Pembiayaan *matching grant* kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan pendanaan investasi di bidang infrastruktur (Kappeler, 2012). Transfer BOS tidak menghilangkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tanggung jawab pendidikan dasar. Di negara Bolivia, penelitian Faguet (2004) menjelaskan desentralisasi fiskal meningkatkan investasi publik di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Penelitian Sánchez (2006) di negara Colombia membuktikan desentralisasi memperbaiki kualitas pendidikan. Hipotesis kelima yang dirumuskan dalam penelitian ini:

H5: Transfer BOS berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat *explanatory research* dengan maksud mencari ide atau hubungan baru melalui pengujian hipotesis (Hasan, 2002). Studi ini mengembangkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan menguji variabel lain yang belum pernah diteliti seiring dinamika keilmuan akutansi sektor publik. Pengujian hipotesis melibatkan lima variabel independen yaitu transfer dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana insentif daerah, bantuan operasional sekolah serta satu variabel dependen yaitu alokasi belanja modal daerah.

Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang memperoleh transfer dana perimbangan dan dana penyesuaian yaitu DID dan BOS selama periode 2012-2014 sebanyak 136 pemerintah daerah. Populasi memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2004). Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability*

sampling dengan cara tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Data penelitian berasal dari laporan realisasi APBD tahun 2012-2014 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Data transfer dana perimbangan dan dana penyesuaian bersumber dari Laporan Keuangan Transfer Ke Daerah. Pengambilan periode penelitian dimulai tahun 2012 dengan pertimbangan bahwa ketentuan transfer dana insentif daerah diberlakukan pertama kali mulai tahun 2010 serta penyempurnaan mekanisme transfer ke daerah yang ditetapkan pada tahun 2012.

Alokasi belanja modal diukur dengan menggunakan skala rasio dari belanja modal pada tahun t dibagi dengan total belanja daerah pada tahun t pada laporan APBD pemerintah daerah. Transfer dana penyesuaian dan dana perimbangan diukur dengan menggunakan skala rasio dari variabel kedua jenis transfer tersebut pada tahun t dibagi dengan total pendapatan daerah pada tahun t pada laporan APBD pemerintah daerah. Untuk menghindari tingginya *standar error* karena penggunaan data penelitian dengan angka yang besar, maka pengukuran variabel penelitian menggunakan rasio (Hidayat, 2013).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Sebelum dilakukan analisis regresi, peneliti melakukan pengujian asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas, heterokedastisitas, dan normalitas. Model persamaan yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$BM = \alpha + \beta_1DAU + \beta_2DAK + \beta_3DBH + \beta_4DID + \beta_5BOS + e$$

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 dengan mempertimbangkan penelitian sosial lebih banyak menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%. Penggunaan tingkat signifikansi 5% lebih sering diterapkan karena dipandang cukup

ketat dalam menguji variabel-variabel penelitian maupun membuktikan korelasi antara variabel cukup jelas (Nazir, 2005).

Uji t bertujuan mengetahui signifikan atau tidak dari pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Uji t menguji hipotesis secara parsial untuk membuktikan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya melalui koefisien regresi.

Uji F dilakukan untuk mendeteksi apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini berhubungan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya sehingga perlu ditetapkan H_0 dan H_a . Apabila H_0 ditolak maka H_a secara otomatis diterima.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Pengujian

Pemerintah daerah yang memperoleh penerimaan DID dan BOS tetapi dikeluarkan dari pemilihan sampel adalah pemerintah provinsi yang memperoleh transfer kedua dana tersebut. Hal ini mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pedoman umum dan alokasi dana BOS bahwa mekanisme penyaluran BOS dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi untuk selanjutnya diteruskan secara langsung kepada Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk hibah. Besaran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian (Sekaran, 2006). Sehingga ukuran sampel sebesar 54 layak untuk pengujian hipotesis.

Uji normalitas penelitian menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* melalui pengujian nilai residual dalam model regresi untuk mendeteksi terdistribusi normal atau

tidak. Berdasarkan output hasil pengujian di atas terlihat bahwa nilai statistik uji *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai *Asymp. Sign (2-tailed)* sebesar 0,516 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H_0 diterima atau data populasi dalam penelitian ini berdistribusi normal. Pengujian *probability plot* memperlihatkan sebaran data berada di sekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian autokorelasi diperlukan untuk mendeteksi adanya pengaruh variabel pengganggu dalam setiap variabel independen. Apabila terdapat autokorelasi dalam model regresi maka varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Berdasarkan output hasil pengujian autokorelasi tersebut diperoleh nilai Durbin Watson (d) sebesar 1,440 dan nilai batas atas sebesar 1,768. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan terhadap adanya autokorelasi dalam model maka hasil pengujian tersebut berada pada rentang nilai $dl < d < du$. Hasil ini mengindikasikan tidak ada keputusan tentang autokorelasi atau tidak menerima maupun menolak hipotesis.

Pengujian heterokedastisitas mendeteksi apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik mengandung homokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas menggunakan uji Glejser. Berdasarkan output hasil perhitungan statistik, nilai probabilitas signifikansi semua variabel dan nilai penyesuaian dan nilai perimbangan sebesar 1,000 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian disimpulkan data penelitian bersifat homokedastisitas yang memenuhi persyaratan klasik model regresi.

Model regresi yang baik harus terbebas dari multikolinearitas. Terjadinya multikolinearitas mengindikasikan bahwa antara variabel independen memiliki hubungan langsung yang sangat kuat. Nilai *tolerance* yang mendekati 0 menunjukkan adanya kolinearitas antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Pengujian

multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan batasan *tolerance* dan VIF. Nilai batas yang digunakan untuk menentukan *tolerance* adalah 0,1 dan nilai 10 untuk VIF (Hair, 1998).

Berdasarkan hasil perhitungan multikolinearitas, dasar pengambilan keputusan untuk nilai *tolerance* variabel DAU adalah $0,274 > 0,10$ dengan nilai VIF adalah $3,646 < 10$; nilai *tolerance* untuk variabel DAK adalah $0,432 > 0,10$ dengan nilai VIF adalah $3,082 < 10$; nilai *tolerance* variabel DBH adalah $0,876 > 0,10$ dengan nilai VIF adalah $1,141 < 10$; nilai *tolerance* untuk variabel DID adalah $0,649 > 0,10$ dengan nilai VIF adalah $1,541 < 10$; serta nilai *tolerance* variabel BOS adalah $0,731 > 0,10$ dengan VIF adalah $1,369 < 10$. Secara keseluruhan untuk semua variabel independen dalam model regresi memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Model tidak mengandung multikolinearitas antara variabel independen.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan kausalitas kedua variabel tersebut. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini mencakup dua pengujian yaitu uji statistik parsial dan uji statistik simultan untuk keseluruhan variabel penelitian. Pengujian parsial dilakukan untuk mendeteksi apakah variabel independen secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis pertama sampai kelima dalam penelitian ini menggunakan Uji-t.

Hasil uji t pada variabel DAU menghasilkan t-hitung sebesar -6,476 dan nilai signifikansi yaitu 0,000 dengan koefisien regresi sebesar -1,260. Dengan menggunakan level kesalahan 5%, nilai signifikansi yang dihasilkan berada pada perbandingan $0,00 < 0,05$ dan t-hitung berada pada rentang nilai t-hitung $< t\text{-tabel}$ yaitu $-0,0648 < -2,011$. Hasil pengujian ini membuktikan H_0 ditolak atau terdapat pengaruh signifikan dalam hubungan kausal tersebut. Pada tingkat kepercayaan 95%, kesimpulannya transfer DAU berpengaruh signifikan

terhadap belanja modal pemerintah daerah pada periode penelitian adalah diterima. Dengan demikian H_1 didukung dalam penelitian ini.

Pengujian variabel DAK menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 1,062 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai statistik t-hitung yang dihasilkan pada tingkat kesalahan 5% adalah 5,934. Apabila nilai t-hitung dibandingkan dengan t-tabel maka diperoleh perhitungan $5,934 > 2,011$ atau berada pada rentang nilai t-hitung $>$ t-tabel. Nilai signifikansi pengujian berada pada perbandingan $0,00 < 0,05$. Hasil perhitungan mengindikasikan H_0 ditolak atau terdapat pengaruh signifikan dalam hubungan kausal variabel penelitian. Pada tingkat kepercayaan 95%, transfer DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada periode penelitian. Dengan kata lain H_2 didukung dalam penelitian ini.

Hipotesis ketiga menguji pengaruh DBH terhadap belanja modal daerah. Pengujian DBH menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,041 dengan koefisien regresi sebesar 0,228. Nilai t-hitung hasil pengujian statistik sebesar 2,098. Pada tingkat kesalahan 5%, *p-value* berada pada nilai perbandingan $0,04 < 0,05$. Sedangkan perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel berada pada rentang $2,098 > 2,011$ atau t-hitung $>$ t-tabel. Keputusan yang diambil dalam pengujian ini adalah H_0 ditolak atau terdapat pengaruh signifikan dalam hubungan kausal variabel penelitian. Dengan demikian disimpulkan H_3 didukung dalam penelitian ini.

Hasil uji t statistik pada variabel DID menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,732 dengan signifikansi sebesar 0,009. Apabila t-hitung dibandingkan dengan t-tabel maka hasil perhitungannya adalah $2,732 > 2,011$ atau t-hitung memiliki nilai lebih besar dibanding t-tabel. Signifikansi variabel DID berada pada perbandingan $0,009 < 0,05$ pada tingkat kesalahan 5%. Dengan demikian keputusan terhadap H_0 adalah ditolak atau terdapat pengaruh signifikan dalam hubungan kausal variabel penelitian. Sehingga H_4 dalam penelitian ini adalah didukung.

Nilai t-hitung hasil pengujian statistik variabel BOS sebesar 0,888 dengan signifikansi yaitu 0,379. Uji statistik ini mengindikasikan bahwa nilai signifikansi pada rentang $0,379 > 0,05$. Sedangkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel berada pada perhitungan $0,888 < 2,011$ atau t-hitung memiliki nilai lebih kecil dibanding nilai t-tabelnya. Kesimpulan dari pengujian ini adalah H_0 diterima atau tidak terdapat pengaruh signifikan dalam hubungan kausal variabel penelitian pada tingkat kesalahan 5%. Dengan demikian H_5 dalam penelitian ini adalah tidak didukung.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji t, persamaan model regresi dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1DAU + \beta_2DAK + \beta_3DBH + \beta_4DID + \beta_5BOS + e$$

$$Y = 0,32 - 1,26DAU + 1,06DAK + 0,23DBH + 0,35DID + 0,89BOS + e$$

Pengujian simultan menghasilkan nilai F-hitung sebesar 9,657 dengan p-value sebesar 0,000. Penentuan F-tabel dihitung dengan menggunakan *degree of freedom*. Besaran df_1 ditentukan dengan rumus $(k-1)$ dan nilai df_2 dirumuskan dengan $(n-k)$. Hasil perhitungan *degree of freedom* sebagaimana tabel di atas, nilai df_1 adalah 5 dan besaran df_2 sejumlah 48. Pada tingkat kesalahan 5%, nilai F-tabel ditentukan sebesar 2,408. Apabila nilai F-hitung dan F-tabel dibandingkan maka diperoleh nilai perbandingan $9,657 > 2,408$ atau F-hitung lebih besar dibandingkan dengan F-tabel.

Perbandingan nilai signifikansi model menunjukkan *p-value* lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti secara simultan variabel DAU, DAK, DBH, DID, dan BOS memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah pada periode penelitian. Hasil *good of fitness* model membuktikan adanya pengaruh simultan dalam penelitian ini.

Koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 0,501. Angka ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya sebesar 50,1%. Variasi dari variabel independen yang meliputi transfer DAU, DAK, DBH, DID, dan BOS mampu menjelaskan variasi variabel belanja modal daerah sebesar 50,1%. Sedangkan sisanya sebesar 49,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dilibatkan dalam model penelitian. Nilai koefisien determinasi sebesar 50,1% memperlihatkan bahwa variabel-variabel independen mampu memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan memprediksi belanja modal pemerintah daerah.

4.2 Pembahasan

Pengujian hipotesis pertama menyatakan transfer DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah. Pemerintah daerah yang memperoleh transfer DAU tinggi maka belanja modalnya cenderung rendah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan *fiscal federalism theory* dan penelitian yang dilakukan Holtz-Eaken (1985), Milas (2001), serta Abdullah dan Halim (2003) yang menyatakan peningkatan DAU akan mendorong belanja modal. Transfer ke daerah sebagai implementasi kebijakan desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui investasi publik.

Filosofi DAU bertujuan menciptakan keseimbangan fiskal dengan mengurangi *vertical imbalance* dan *horizontal imbalance*. Daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dan kebutuhan fiskalnya tinggi maka alokasi DAU daerah tersebut menjadi besar. Dengan demikian transfer DAU yang besar lebih ditujukan untuk menutup kebutuhan fiskal daerah. Bukti empiris bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal daerah semakin memperkuat bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki kemampuan fiskal yang rendah sehingga DAU yang bersifat *non matching grant* masih banyak dipergunakan untuk pembiayaan keperluan rutin dan operasional pemerintahan. DAU masih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain (Yovita, 2011).

DAU sebagai *non matching grant* menjadi instrumen terbaik untuk peningkatan kesejahteraan secara umum (Shah, 1994). Namun banyak pemerintah daerah memanfaatkan transfer DAU hanya cukup untuk menutup biaya administrasi dasar sebagai akibat kelebihan pegawai. Pengalihan pegawai pusat kepada pemerintah daerah sejak tahun 2000 memberi kontribusi pada peningkatan belanja pegawai APBD. Kondisi ini memaksa penerimaan DAU dalam APBD belum terlalu banyak diarahkan pada belanja modal.

Ketiadaan pengawasan dalam bentuk penggunaan secara khusus memungkinkan pemerintah daerah tidak terlalu fokus untuk mengarahkan pada *quality spending*. Hal ini menyebabkan problem dalam penentuan penggunaan belanja daerah yang lebih mementingkan kompromi bersama antara eksekutif dan legislatif karena adanya *self interest*. Bird dan Vaillancourt (1992) berpendapat rancangan bantuan mungkin berasal dari deviasi kebutuhan publik dan stabilitas politik.

Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa transfer DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah. Koefisien regresi yang dihasilkan sebesar 1,062 dengan *p-value* adalah 0,000. Semakin tinggi peningkatan transfer DAK maka belanja modal daerah akan semakin meningkat. Salah satu instrumen penting dalam peningkatan perekonomian adalah dukungan belanja modal dalam rangka investasi publik. Hasil pengujian mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Kappeler (2012), Boex (2013), Miharbi (2012), Wardana (2012), Sumarmi (2009), dan juga Tuasikal (2008).

DAK merupakan kompensasi atas kekurangan pembiayaan pembangunan fisik di daerah sehingga faktor ini menjadi salah satu penentu peningkatan belanja modal daerah. Sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005, DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup.

Sebagai komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping sebesar minimal 10% dari jumlah alokasi DAK pada APBD. Kewajiban ini menjadi pendorong komitmen pemerintah daerah untuk berpartisipasi baik melalui anggaran maupun pelaksanaan pembangunan di daerah. Semakin besar transfer DAK maka akan semakin besar dana belanja modal APBD yang harus disediakan.

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah adalah DAK. Pelaksanaan pembangunan terlihat melalui ketepatan program kegiatan yang direncanakan, dukungan anggaran yang memadai. DAK memberi manfaat yang besar bagi pemerintah daerah melalui kegiatan fisik dalam rangka pencapaian prioritas nasional. Shah (2007) menyatakan DAK bertujuan memberi insentif bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan khusus yang bersifat prioritas pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan transfer DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah. Semakin tinggi transfer DBH yang diberikan kepada pemerintah daerah maka belanja modal daerah juga akan semakin meningkat. Nilai statistik pengujian *p-value* sebesar 0,041 dengan koefisien regresi 0,228. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1997), Masdjojo dan Sukartono, Wardana (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh positif penerimaan DBH terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Transfer dana kepada pemerintah daerah tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pembangunan, tetapi juga memperhatikan *tax effort and tax capability* (MacAndrews, 2000). Terdapat korelasi positif antara penerimaan pajak dengan pembangunan daerah. Secara teoritis pemerintah daerah dapat memperoleh penerimaan pajak untuk membiayai APBD berasal dari tiga cara yakni *tax sharing*, *surcharge*, dan memungut pajak sendiri.

Hasil pengujian statistik membuktikan hipotesis keempat penelitian didukung, transfer DID berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah. Semakin besar transfer

DID maka akan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Nilai statistik pengujian *p-value* sebesar 0,009 dengan koefisien regresi 2,732. Salah satu kriteria penentu daerah penerima DID adalah peningkatan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan penentuan kriteria tersebut, pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Transfer ke daerah harus mampu memberi insentif bagi pemerintah daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dengan cara optimalisasi. Pemerintah lebih memilih untuk memberi bantuan yang menyentuh peningkatan layanan publik dibandingkan dengan pemberian subsidi. Pelaksanaan desentralisasi fiskal didorong oleh alasan pembangunan ekonomi (Brodjonegoro, 2006) dan kebutuhan peningkatan layanan publik (Dillinger, 1994).

DID merupakan insentif bagi pemerintah daerah yang memiliki prestasi dalam bidang akuntabilitas dan kinerja ekonomi. Insentif pemerintah ini diharapkan mampu menciptakan *fiscal competition* sehingga setiap daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat terwujud melalui investasi publik. Belanja modal daerah merupakan salah satu pendorong investasi publik.

Berdasarkan hasil pengujian, nilai *p-value* variabel BOS sebesar 0,379 dengan koefisien regresi adalah 0,888. Pengujian statistik ini membuktikan hipotesis kelima penelitian tidak didukung. Transfer BOS tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Pengujian ini juga bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya tentang *matching grant* yang dilakukan Sanchez (2006) dan Kappeler (2012).

BOS dalam rangka bantuan penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah belum mampu memberi keleluasaan APBD untuk meningkatkan penggunaan belanja modal. BOS dapat dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya mengarah belanja modal dalam rangka peningkatan layanan pendidikan, namun pemanfaatan BOS masih banyak digunakan untuk belanja operasional non investasi

Pemerintah daerah terlihat belum dapat melaksanakan salah satu peran penting dalam perekonomian modern yakni fungsi alokasi. Adanya alokasi anggaran yang memadai pada sektor pendidikan dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas serta mempercepat pencapaian MDG's. Pemerintah pusat telah berupaya semaksimal mungkin untuk memprioritaskan pendidikan dasar meskipun kewenangan tersebut sudah dialihkan kepada pemerintah daerah. Pada kenyataannya permasalahan yang terjadi di lapangan cukup banyak sehingga transfer BOS tidak dapat mendorong belanja modal daerah.

Pemanfaatan BOS tidak dapat membedakan peruntukan bagi siswa mampu dan miskin sehingga subsidi pendidikan tersebut secara umum dapat dinikmati semua kalangan masyarakat. Kondisi ini memaksa dana BOS sebagian besar terserap untuk biaya rutin. BOS tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), namun selanjutnya diharapkan meningkatkan mutu pendidikan. Sasaran ini semestinya dibarengi dengan arah belanja APBD pada program yang mengarah pada perbaikan layanan dasar dan penyediaan fasilitas.

5. Simpulan, Implikasi Dan Keterbatasan

Penelitian ini menguji pengaruh dana perimbangan yaitu DAU, DAK, DBH dan transfer dana penyesuaian yaitu DID serta BOS terhadap belanja modal pemerintah daerah di Indonesia selama rentang waktu 2012-2014. Transfer DAU, DAK, DBH, dan DID memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Sedangkan transfer BOS tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah. Semua variabel penelitian yakni DAU, DAK, DBH, DID dan BOS secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Dengan demikian transfer dana perimbangan dan dana penyesuaian berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam beberapa hal sehingga diperlukan perluasan dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini antara lain menggunakan data sekunder terbatas yang bersumber dari Laporan Keuangan Transfer Ke Daerah, Laporan Realisasi APBD, dan Laporan Penggunaan Dana BOS. Rentang waktu penelitian hanya mengambil periode 3 tahun yakni 2012-2014. Pelaksanaan DID yang dimulai tahun 2010 memungkinkan pengujian dilakukan selama kurun waktu lima tahun.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengurangi beberapa keterbatasan riset. Perluasan dana penyesuaian yang tidak hanya pada dana insentif daerah dan bantuan operasional sekolah melainkan pada jenis dana penyesuaian lainnya maupun dana tugas perbantuan dan dana konsentrasi yang lebih mengarah pada sasaran sektoral. Variabel non keuangan perlu dilibatkan dalam penelitian ini. APBD merupakan produk legitimasi bersama antara eksekutif dan legislatif sehingga dipengaruhi oleh komitmen politik. Pemerintah pusat dapat terus menyempurnakan formulasi dan mekanisme pengelolaan BOS sehingga dapat mendorong peningkatan belanja modal daerah. Pemerintah daerah senantiasa meningkatkan *quality spending* APBD dan memperkuat *empowering local tax*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersson, L. (2002). The effect of Swedish local public expenditure of a change in Swedish intergovernmental grant system. *University of Lund, working paper*.
- Bahl, R., & Linn J. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Boex, V. (2013). *The Design of Equalization Grants : Theory and Applications*. Georgia State University: Andrew Young School of Policy Studies.
- De Mello, L. (2010). *Fiscal Decentralization and Public Investment : The Experience of Latin America OECD Economics Department Working Papers No. 824*.
- Faguet, J. (2004). Does Decentralization Increase Government Responsiveness to Local Needs?: Evidence from Bolivia. *Journal of Public Economics*, 88 (3-4), pp. 867-893.
- Hayek, F. (1945). The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review*, 35, pp. 519-530.
- Ilyas, Y. (2013). *Evaluasi Belanja Modal Daerah*. Jakarta: Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

- Kappeler, A., & Olle, Albert, & Stephan, Andreas. (2012). Does Fiscal Decentralization Foster Regional Investment in Productive Infrastructure. *Deutsches Institut Fur Wirtschaftsforschung*.
- Kemenkeu, D. (2014). Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik *Pelengkap Buku Pegangan 2014*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kusnandar, D. S. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Lee, Y.-H. (2013). The Effects of Intergovernmental Transfers For Urban Development In Korea. *Semyung University, Korea*.
- Lin, J. Y., & Zhiqiang Liu. (2000). Fiskal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change Chicago, Vol 49*, pp. 1-21.
- Liu, Y., & J Martinez-Vazquez, & Baoyun Qiao. (2014). Falling Short : Intergovernmental Transfers In China. *International Center for Public Policy Working Paper Series*.
- Martinez-Vazquez, J. (2011). The Impact of Fiscal Decentralization: Issues in Theory and Challenges in Practice. *Department of Economics at ScholarWorks Georgia State University*.
- Milas, G. L. A. C. (2001). Non-linear and Asymmetric adjustment in the local revenue-expenditure models: Some evidence from the Italian municipalities. *Working Paper University Of Milan*.
- Musgrave, R. (1959). *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw.
- Musgrave, R. (1980). *Public Finance In Theory and Practice*. London: Mcgrw – Hill Book Company.
- Naganathan, J. S. a. (1999). Federal Transfers And The Tax Efforts Of States In India. *Indian Economic Journal, Vol. 47 No. 4*, 101-110.
- Oates, W. (1972). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* 46.
- Oates, W. (2006). On The Theory And Practice Of Fiscal Decentralization. *IFIR working Paper*.
- Ravallion, M. (1998). Reaching Poor Areas in a Federal System. *Policy Research Working Paper Series, 1901*.
- Sánchez, F., & Faguet. (2006). Decentralization and Access to Social Services in Colombia. *Center for Latin American Studies Working Paper Series*.
- Shah, A. (1994). The Reform Of Intergovernmental Fiscal Relations In Developing and Emerging Market Economies. *ISBN*.
- Strumpf, K. e. a. (1999). Decentralization and Government Provision of Public and Private Goods:The Public Health Sector in Uganda. *Le Financement de la Santé dans les Pays d’Afrique et d’Asie à Faible Revenu*, 363.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.
- West, L. a. C. W. (1995). Fiscal Decentralization and Growing Regional Disparities in Rural China: Some Evidence in the Provision of Social Services. *Oxford Review of Economic Policy, 11 (4)*, 70.
- WorldBank. (2007). *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia : Memaksimalkan Peluang Baru*. Jakarta: The World Bank.
- Zou, H.-F. (1994). Dynamic Effects Of Federal Grants On Local Spending. *Journal Of Urban Economics, 36*, 98-115.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,03901991
	Absolute	,111
Most Extreme Differences	Positive	,111
	Negative	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z		,818
Asymp. Sig. (2-tailed)		,516

Tabel 2 Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,708 ^a	,501	,450	,041002	1,440

a. Predictors: (Constant), BOS, DBH, DAK, DID, DAU

b. Dependent Variable: BM

Tabel 3 Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,284E-017	,030		,000	1,000
	DAU	,000	,076	,000	,000	1,000
	DAK	,000	,283	,000	,000	1,000
	DBH	,000	,348	,000	,000	1,000
	DID	,000	,557	,000	,000	1,000
	BOS	,000	,429	,000	,000	1,000

a. Dependent Variable: Abs_Res_1

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DAU	,274	3,646
	DAK	,324	3,082
	DBH	,876	1,141
	DID	,649	1,541
	BOS	,731	1,369

a. Dependent Variable: BM

Tabel 5 Uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,319	,030		10,592	,000
	DAU	-,490	,076	-1,260	-6,476	,000
	DAK	1,679	,283	1,062	5,934	,000
	DBH	,730	,348	,228	2,098	,041
	DID	1,521	,557	,346	2,732	,009
	BOS	,381	,429	,106	,888	,379

a. Dependent Variable: BM

Tabel 6 Uji Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,081	5	,016	9,657	,000 ^b
1 Residual	,081	48	,002		
Total	,162	53			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), BOS, DBH, DAK, DID, DAU